

Daftar Pustaka

A. Buku

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, halaman 104

Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 89, 198.

Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 82.

B. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 48-50.

M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 155, 160, 162.

Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 34.

Sadjijono. *Etika Profesionalisme Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010, halaman 112.

Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Kepolisian*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 94.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2007, hlm. 112.

B. Jurnal

Adila Hafidzatul Maufiro. "Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap (Error in Persona) disertai Penganiayaan menurut UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1981." *Turnitin Report/Jurnal*, 2024.

Abdurrahman, "Aspek-Aspek Pertanggungjawaban Etika Profesi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 16, No. 4, UI Press, 1986, hlm. 345.

"Akuntabilitas Penggunaan Kekuatan dalam Diskresi Kepolisian." *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2019.

C. L. Hapsoro. "Akuntabilitas Penegakan Hukum terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2023

Hamdani Ritonga, Marlina, dan Mustamam. "Penindakan Propam Polri Terhadap Anggota Polisi yang melakukan Penganiayaan." *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Haniyah. "Rekonstruksi Hukum Kasus Error in Persona: Tantangan Penegakan Keadilan Berdasarkan Asas Due Process of Law." *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2024.

Muhammad Wildan Mufti. "Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)." *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 2, No. 2, April 2023, hlm. 87-88

Siregar, S. N. "Tinjauan kritis reformasi kultural Polri 1999-2012." *Jurnal Penelitian Politik*, 2014, hlm. 131-148.

Yudha Bayhaqi, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol. 8, No. 3, 2025.

Yusriyadi. "Tebaran Pemikiran Tentang Penafsiran Hukum." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 12 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Artikel

Abdi Tumanggor, “Kronologi Anggota Brimob Bripda Mesias Siahaya Aniaya Siswa SMP hingga Tewas”, *Tribun-Medan.com*, 21 Februari 2026, pukul 21.00 WIB, diakses melalui <https://share.google/vJnZ32SegOn8bR4XW>.